



**MANAJEMEN PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG
SEMERU BERBASIS KOMUNITAS**

**(Studi Kasus Pada Penanganan Pra Bencana di Desa Supit Urang
Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)**

*Management of Community Based Disaster Risk Reduction
(Case Study On Pre Disaster Management in The Viillage of Supit Urang
Sub Pronojiwo District Lumajang)*

SKRIPSI

Oleh

Erwin Iswahyudi

080910201037

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014



**MANAJEMEN PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG
SEMERU BERBASIS KOMUNITAS
(Studi Kasus Pada Penanganan Pra Bencana di Desa Supit Urang
Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)**

*Management of Community Based Disaster Risk Reduction
(Case Study On Pre Disaster Management in The Viillage of Supit Urang
Sub Pronojiwo District Lumajang)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Erwin Iswahyudi
NIM 080910201037**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMNISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Sugeng Wahyudi, S.Ap dan Ibunda Setianingsih, S.Ap yang telah membesarkan, mendidik serta senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dengan penuh ketulusan yang tiada pernah putus mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi saya hingga detik ini. Segala ucapan terimakasih, tidak akan pernah cukup menggambarkan penghargaan ini
2. Kakak-kakakku Firman Iswahyudi dan Febri Hardianto yang senantiasa menjadi penghibur dan penyemangatku
3. Guru-guruku dari TK, SD, SMP, SMA serta Perguruan Tinggi
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember.

MOTTO

Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata¹

Dahlan Iskan

Di mana Anda berada saat ini, tidak menentukan di mana Anda akan berakhir²

Barack Obama

¹ Jawa Pos, edisi 24 Maret 2012

² katabijak.com

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erwin Iswahyudi

NIM : 080910201037

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“MANAJEMEN PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG SEMERU BERBASIS KOMUNITAS (Studi Kasus Pada Penanganan Pra Bencana di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intitusi lain, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Desember 2013

Yang menyatakan,

Erwin Iswahyudi

NIM 080910201037

SKRIPSI

**MANAJEMEN PENGURANGAN RISIKO BENCANA GUNUNG
SEMERU BERBASIS KOMUNITAS**

**(Studi Kasus Pada Penanganan Pra Bencana di Desa Supit Urang
Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang)**

*Management of Community Based Disaster Risk Reduction
(Case Study On Pre Disaster Management in The Viillage of Supit Urang
Sub Pronojiwo District Lumajang)*

Oleh

**Erwin Iswahyudi
NIM 080910201037**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Anwar, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S. Sos, M.A

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas (Studi Kasus Pada Pra Bencana di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang) telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Februari 2014
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Sekretaris,

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Anggota Penguji:

Drs. Boedijono, M.Si (.....)
NIP. 196103311989021001

Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP (.....)
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas (Studi Kasus Pada Pra Bencana di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang); Erwin Iswahyudi, 080910201037; 2014: 142 halaman: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Bencana merupakan sesuatu yang sering diidentikkan dengan kejadian buruk oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan berbagai cara dan langkah untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di daerah, salah satunya peredaman risiko bencana. Peredaman risiko bencana harus dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas lokal dan pihak berwenang dalam setiap langkah pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas menjadi metode alternatif penanggulangan risiko bencana. Sebagai desa yang masuk dalam peta rawan bencana Gunung Semeru, Desa Supit Urang merupakan satu-satunya desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana Gunung Semeru, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana Gunung Semeru yang merugikan. Pada tahun 2011 atas inisiatif masyarakat di Desa Supit Urang telah terbentuk komunitas dengan sebutan Laskar Semeru. Komunitas ini memprioritaskan pada kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahap pra bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa Supit Urang. Data sekunder yang digunakan adalah buku, kebijakan pemerintah serta dokumen-dokumen pendukung kegiatan pengurangan risiko bencana. Teknik pengumpulan

data primer yang digunakan adalah berupa wawancara dan observasi, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder menggunakan dokumentasi dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari informan kunci yang diwakili oleh Sekretaris Laskar Semeru, Kepala Desa Supit Urang, serta beberapa tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Supit Urang telah terbentuk komunitas pengurangan risiko bencana Gunung Semeru. Pelaksanaan manajemen pengurangan risiko bencana Gunung Semeru berbasis komunitas di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan cukup baik. Komunitas Laskar Semeru selalu melibatkan partisipasi masyarakat Desa Supit Urang.

PRAKATA

Puji syukur kehahirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Jampersal di Puskesmas Mojopanggung Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Hermanto Rohman, S.Sos, M.AP., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Drs Supranoto M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang turut memberikan dukungan, arahan, dan nasehat selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Seluruh anggota Laskar Semeru Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang yang bersedia membantu penulis memperoleh data-data;
7. Seluruh Dosen dan staf akademik Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember;

8. Kedua orangtuaku Sugeng Wahyudi, S.Ap dan ibunda Setianingsih, S.Ap yang telah memberikan doa, restu, semangat dan kasih sayang sehingga anakmu ini bisa lulus. Terimakasih banyak;
9. Kakak-kakakku tersayang Firman Iswahyudi dan Febri Hardianto, yang telah memberi semangat dan nasihat selama menjalani pendidikan;
10. Para sahabat terkasih Wiba Puspita, Aiuk Pinariyo, Okky Dwi Permadi, dan Rica Anindyarani terima kasih atas kebersamaan, masukannya dan saling melengkapi yang tercipta selama ini, tak lupa untuk teman dekatku Annisa Huda Muya Jannah terima kasih telah menjadi tempat berbagi, terimakasih atas kebersamaan, perhatian, kasih sayang dan omelannya selama ini;
11. Keluarga besar kos Ibu Hj. Sumiati, yang telah menjadi sahabat selama saya menyelesaikan pendidikan, sahabat terbaik dan seperjuangan Dany Yanuar, Faisal Ali, serta para awak Kos Lapas 23 Dicky, Fian, Rizal, Bagus dan Septian yang telah menjadi saudara dan keluarga selama diperantauan dan terimakasih atas semua perhatian dan kebersamaannya selama ini;
12. Keluarga besar Administrasi Negara angkatan 2008 Reguler dan Non-Reguler yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.1.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Perspektif Administrasi Publik Dalam Bencana	14
2.2 Pengurangan Risiko Bencana	17
2.3 Manajemen Bencana.....	19
2.3.1 Bencana.....	19
2.3.2 Penanggulangan Bencana	21
2.3.3 Manajemen.....	23
2.3.4 Manajemen Bencana.....	23

2.4	Manajemen Pengurangan Risiko Bencana.....	25
2.4.1	Konsep Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas	25
2.4.2	Tahap-Tahap Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas	27
2.4.3	Pemberdayaan dan Partisipasi.....	30
BAB 3.	METODE PENELITIAN.....	34
3.1	Jenis Penelitian	34
3.2	Objek dan Lokasi Penelitian	35
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4	Penentuan Informan.....	38
3.5	Metode Analisis Data.....	40
3.6	Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1	Gambaran Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1	Kabupaten Lumajang.....	44
4.1.2	Desa Supit Urang.....	45
4.2	Desa Supit Urang Termasuk Daerah Rawan Bencana.....	46
4.3	Peran Komunitas Dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	48
4.3.1	Proses Pembentukan Komunitas Pengurangan Risiko Bencana di Desa Supit Urang	48
4.3.2	Proses dan Kegiatan Komunitas Dalam Pengurangan Risiko Bencana di Desa Supit Urang.....	54
4.3.3	Sumber Pendanaan	62
4.4	Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas....	63
4.4.1	Perencanaan	64
4.4.2	Pengorganisasian	66
4.4.3	Pelaksanaan.....	68
4.4.4	Evaluasi.....	72
BAB 5.	PENUTUP	76
5.1	Kesimpulan	76

5.2 Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



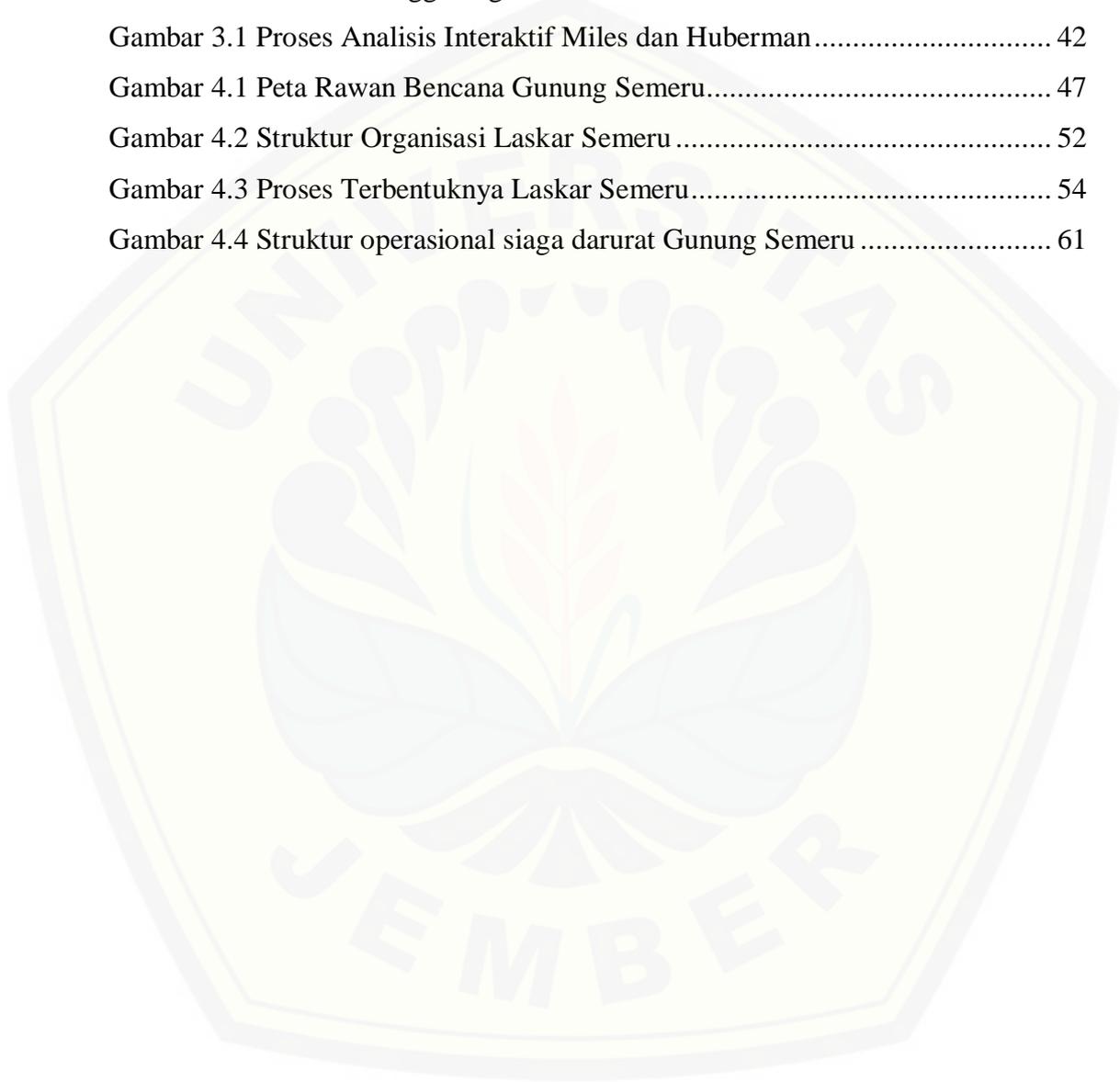
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Analisis Kegiatan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana
Komunitas Laskar Semeru 74



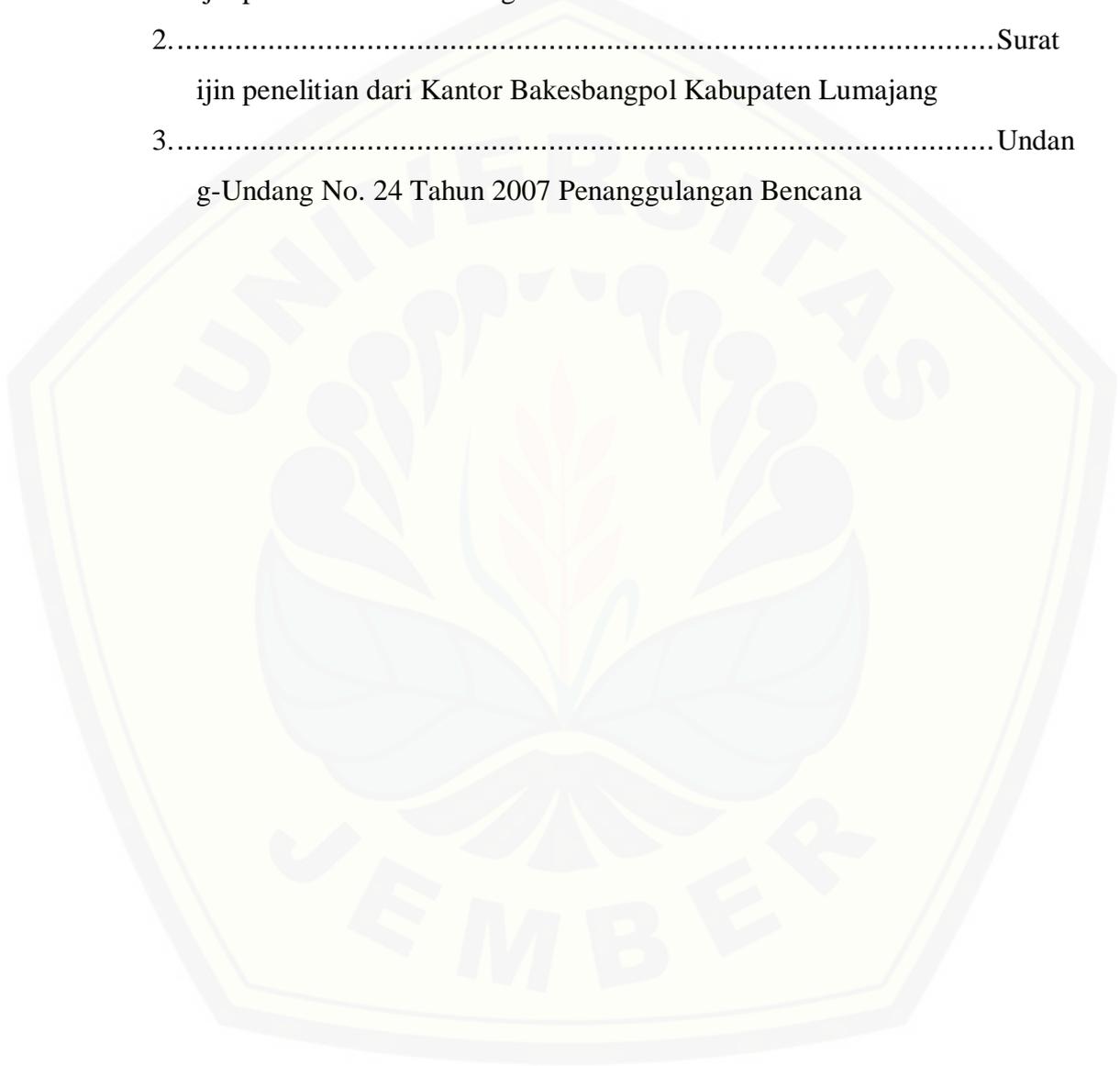
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta kawasan rawan bencana alam Kabupaten Lumajang	6
Gambar 2.1 Siklus Penanggulangan Bencana	22
Gambar 3.1 Proses Analisis Interaktif Miles dan Huberman.....	42
Gambar 4.1 Peta Rawan Bencana Gunung Semeru.....	47
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Laskar Semeru	52
Gambar 4.3 Proses Terbentuknya Laskar Semeru.....	54
Gambar 4.4 Struktur operasional siaga darurat Gunung Semeru	61



DAFTAR LAMPIRAN

- 1.....Surat
ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- 2.....Surat
ijin penelitian dari Kantor Bakesbangpol Kabupaten Lumajang
- 3.....Undan
g-Undang No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terletak digaris khatulistiwa pada posisi silang antara dua benua besar dan dua samudera yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi. Indonesia juga berada di atas lempeng benua yang masih aktif, dengan barisan gunung api yang masih aktif (*ring of fire*) sehingga Indonesia sering sekali disapa dengan negara yang sangat akrab dengan bencana. Kondisi geografis Negara Indonesia itulah yang merupakan faktor penyebab kerentanan Indonesia terhadap bencana.

Bencana merupakan sesuatu yang sering diidentikkan dengan kejadian buruk oleh masyarakat. Bencana atau sering disebut dengan “*disaster*” dalam Bahasa Inggris merupakan salah satu peristiwa yang tidak dapat terpisahkan dalam sejarah kehidupan manusia.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ramli, 2010:17).

Menurut *United Nation for Development Program/UNDP* (dalam Ramli, 2010:18) bencana dikelompokkan atas 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana social yaitu:

- a. bencana alam (*natural disaster*) antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hamapenyakit tanaman, epidemic, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa;
- b. bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak

industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan;

- c. bencana sosial antara lain berupa kerusuhan dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi termasuk bencana akibat peperangan;

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007, bencana diklasifikasi atas 3 jenis sebagai berikut.

1) Bencana Alam

Yaitu bencana yang bersumber dari fenomena alam seperti gempa bumi, letusan gunung api, meteor, pemanasan global, topan, dan tsunami.

2) Bencana Non Alam

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit.

3) Bencana Sosial

Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Untuk setiap jenis bencana harus dipersiapkan pedoman penanganannya sehingga setiap anggota masyarakat dapat mengetahuinya dan meminimalisir jumlah korban jiwa. Persiapan dalam menghadapi letusan gunung api antara lain sebagai berikut (Ramli, 2010:94).

- a) Mengenali daerah setempat dalam menentukan tempat yang aman untuk mengungsi.
- b) Membuat perencanaan penanganan bencana.
- c) Mempersiapkan pengungsian jika diperlukan.
- d) Mempersiapkan kebutuhan dasar.

Tumbuhnya kesadaran akan perlunya upaya preventif dalam penanggulangan bencana hampir dapat dipastikan tumbuh setelah melalui pengalaman kejadian bencana yang terus menerus atau bencana dalam skala yang lebih besar. Indonesia memiliki kebangkitan kesadaran bersama akan perlunya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif setelah kejadian bencana

tsunami Aceh dan Nias tanggal 26 Desember 2004. Dua tahun setelah kejadian bencana tersebut, Indonesia mengesahkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. Undang-Undang No. 24/2007 yang disusun atas inisiatif DPR dengan didukung seluruh *stakeholder* kebencanaan di Indonesia, merupakan bentuk kebijakan dan komitmen bersama untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lebih baik. Beberapa kelemahan pokok yang diamanatkan untuk ditingkatkan adalah perlunya peraturan-peraturan yang operasional (regulasi), kelembagaan yang kuat, perencanaan dan pendanaan yang memadai. Di samping itu penyelenggaraan penanggulangan bencana juga berbasis pada paradigma pengurangan risiko bencana yang ditunjang oleh penyelenggara PB yang ahli dan professional. Untuk itu diperlukan program-program pembangunan dan pengembangan kapasitas di semua tingkatan.

Sangat disadari, konsep penanggulangan di masa lalu, di mana penanggulangan bencana lebih banyak bersifat respon sehingga diperlukan tindakan cepat yang sentralistik, ternyata tidak mampu menunjukkan hasil yang memuaskan. Bahkan lebih banyak menuai kecaman dan ketidakpuasan dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Upaya Pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat respon, dinilai lambat, kurang terkoordinasi dan tidak terencana dengan baik. Persiapan-persiapan untuk menunjang operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif harus telah disiapkan sebelumnya dalam bentuk SOP, rencana kedaruratan atau kontinjensi, sumber daya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup.

Di seluruh wilayah Indonesia banyak ditemukan daerah bergunung api sehingga bencana letusan gunung api sering terjadi antara lain Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Galunggung, Gunung Semeru dan lainnya. Gunung api tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan posisi Indonesia yang berada dalam jalur "*ring of fire*".

Menurut Ramli (2010:20) bahwa letusan terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1.000°C. Cairan magma yang keluar dari

dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700-1.200°C. Letusan gunung api yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bias membanjiri sampai sejauh radius 90 km.

Menurut Ramli (2010:20) bahaya letusan gunung api dibagi menjadi 6 (enam) bagian berdasarkan waktu kejadiannya yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Awan panas merupakan campuran material letusan antara gas dan bebatuan (segala ukuran) terdorong kebawah akibat densitas yang tinggi dan merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi bagaikan gunung awan yang menyusuri lereng. Selain suhunya sangat tinggi, antara 300-700°C, kecepatan lumpurnya pun sangat tinggi, >70km/jam (tergantung kemiringan lereng).
- b. Lontaran material (pijar), terjadi ketika letusan (magmatic) berlangsung. Jauh lontarannya sangat tergantung dari besarnya energy letusan yang bias mencapai ratusan meter. Selain suhunya yang sangat tinggi (>200°C), ukuran materialnya juga besar dengan diameter >10cm sehingga mampu membakar sekaligus melukai, bahkan mematikan makhluk hidup.
- c. Hujan abu lebat, terjadi ketika letusan gunung api sedang berlangsung. Material yang berukuran halus (abu dan pasir halus) yang diterbangkan angin dan jatuh sebagai hujan abu. Arah jatuhnya tergantung arah dan kecepatan angin. Karena ukurannya yang halus, material ini sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup baik flora maupun fauna karena mengandung unsur-unsur kimia yang bersifat asam sehingga mampu mengakibatkan korosi terhadap bahan-bahan logam.
- d. Lava merupakan magma yang mencapai permukaan, sifatnya *liquid* (cairan kental dan bersuhu tinggi, antara 700-1200°C). Karena berbentuk cair, lava umumnya mengalir mengikuti lereng dan membakar apa saja yang dilaluinya. Bila lava sudah dingin, wujudnya berubah menjadi batu dan daerah yang dilaluinya akan menjadi lading batu.

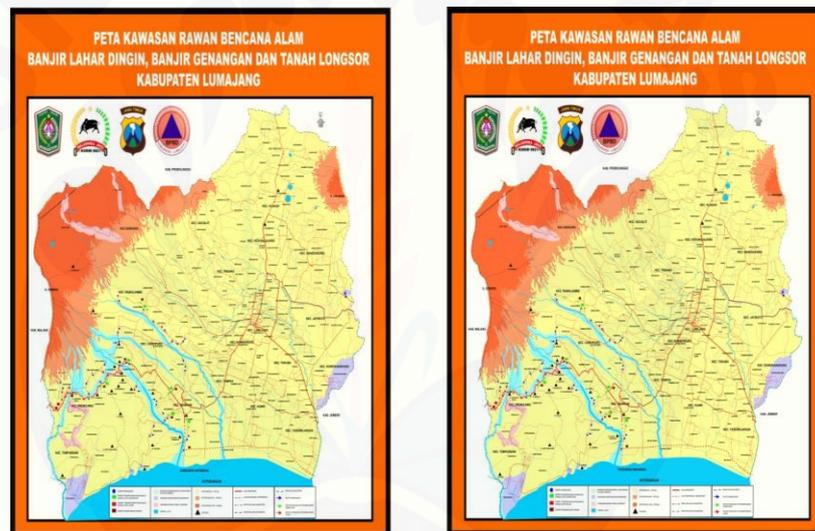
- e. Gas beracun, muncul tidak selalu didahului oleh letusan gunung api sebab gas ini dapat keluar melalui rongga-rongga ataupun rekahan-rekahan yang terdapat di daerah gunung api. Gas utama yang biasanya muncul adalah CO₂, H₂S, HCL, SO₂, dan CO. yang kerap menyebabkan kematian adalah gas CO₂.
- f. Tsunami, umumnya dapat terjadi pada gunung api pulau, dimana saat letusan terjadi material-material akan memberikan energy yang besar untuk mendorong air laut ke arah pantai sehingga terjadi gelombang tsunami. Semakin besar volume material letusan makin besar gelombang yang terangkat ke darat.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang tergolong mempunyai kondisi wilayah rawan bencana. Wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak di dataran rendah di antara pegunungan Bromo Tengger dengan Argopuro di bagian Selatan Pulau Jawa bagian timur, wilayah ini terbentuk akibat pertemuan lempeng Eurasia dari arah barat, lempeng Australia dari arah barat laut. Zona tumbukan ini mengakibatkan daerah ini sering terjadi gempa bumi dan terbentuknya gunung berapi di wilayah Jawa Timur. Kondisi geografi Kabupaten Lumajang yang sudah dipaparkan di atas salah satu penyebab mengapa Kabupaten Lumajang menjadi kabupaten yang rawan bencana. Bencana alam yang menimpa Kabupaten Lumajang terdiri dari berbagai macam bencana, diantaranya gunung berapi, tanah longsor, puting beliung, banjir dan tsunami. (Sumber: Buku Profile Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lumajang, 2012:1)

Terdapat dua gunung api aktif di Kabupaten Lumajang, yaitu Gunung Lamongan dan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Gunung Semeru merupakan terletak di sebelah barat daya dari Kabupaten Lumajang. Gunung Semeru salah satu objek pariwisata andalan di Kabupaten Lumajang. Menurut catatan sejarah, 5 Mei 1963 mulai jam 14.10 WIB terjadi awan panas dan aliran lava melanda Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas mencapai 8 km dari bibir kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan

pembentukan kubah lava dititik letusan tahun 1963 pinggir kawah selatan (hulu kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan) mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru). Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali. Pada Tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung. Bnajir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber Wungkil. (Sumber Data: BPBD Kab. Lumajang, 2012)

Untuk melihat gambaran 3 dimensi dari kawasan rawan bencana Gunung Semeru yang ditumpangkan di atas citra satelit landsat dengan data SRTM sebagai layer ketinggiannya, berikut gambarannya



Gambar 1.1 Peta kawasan rawan bencana alam Kabupaten Lumajang

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa ada 5 kecamatan dan 16 desa yang terancam erupsi Gunung Semeru. Daerah tersebut meliputi kecamatan Candipuro dengan desa yang terancam antara lain Desa Jugosari, Sumberwuluh, Penanggal, Subermujur, Kloposawit, Sumberejo. Kecamatan Pronojiwo terdiri dari 4 desa yang terancam yaitu Desa Pronojiwo, Supiturang, Oro oro Ombo, Sumberurip. Kecamatan terdampak lainnya adalah Kecamatan Tempeh dengan dua desa terdampak yaitu desa Gesang dan Jatisari. Kemudian Kecamatan Pasirian dengan dua desa terdampak yaitu Desa Sememu dan Gondoruso. Dan kecamatan terakhir yang terancam erupsi Gunung Semeru yaitu Kecamatan Pasrujambe dengan desa yang terdampak di Desa Pasrujambe dan Kertosari.

Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwasannya Tugas/Tujuan Negara antara lain adalah “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum*”. Hal-hal mengenai perlindungan rakyat yang menunjukkan perwujudan dari kewajiban pemerintah dalam melindungi rakyat sebagai bagian dari hak asasi rakyat sehingga penanganan terhadap bencana merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat dari resiko bencana.

Undang-Undang telah mengamanatkan bahwa bencana merupakan urusan bersama dan harus ditangani secara bersama-sama antara unsur pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Pemerintah bukan aktor satu-satunya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tetapi pemerintah bertindak sebagai penanggungjawab utama, fasilitator dan *regulator*. Di mana dalam penetapan setiap kebijakan haruslah melalui partisipasi atau peran serta seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai sebuah regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif, UU No. 24/2007 masih tergolong baru dan perlu disosialisasikan secara intensif. Sebagai implementasi awal yang mendapatkan pujian dari kalangan baik di dalam maupun di luar negeri adalah perkuatan kelembagaan. Pada tingkat pusat telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan Permendagri No. 46/2008 diamanatkan bahwa setiap provinsi wajib membentuk BPBD sedangkan kabupaten/kota “dapat” membentuk BPBD. Sedangkan dalam UU No. 24/2007 untuk masalah ini hanya disebutkan pada Pasal 5 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan bencana dan Pasal 10 ayat (1) Pemerintah membentuk Badan Nasional penanggulangan Bencana dan Pasal 18 ayat (1) Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Peraturan daerah(Perda).

Sedangkan di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada Bab I dijelaskan mengenai Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada poin C dijelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan organisasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

Mengelola bencana tidak bisa dilakukan hanya dengan cara dadakan atau insidental, tetapi harus dilakukan secara terencana dengan manajemen yang baik, jauh sebelum suatu bencana terjadi. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Menurut Ramli (2010:27), penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana (pra-bencana), tanggap darurat dan rehabilitasi (pasca bencana).

Menurut Ramli (2010:31), secara umum kegiatan Manajemen Bencana dapat dibagi menjadi tiga tahapan (setiap tahap terdiri dari beberapa kegiatan penanggulangan bencana). Adapun tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Pra-Bencana.

Pada tahap Pra-Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Mitigasi Bencana (*disaster mitigation*)
- b. Kesiapsiagaan (*preparedness*)
- c. Peringatan Dini (*early warning system*);

2. Tahap Saat Bencana.

Pada tahap Saat Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Tanggap Darurat (*emergency response*);

3. Tahap Pasca-Bencana.

Pada tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

- a. Rehabilitasi (*rehabilitation*);
- b. Rekonstruksi (*reconstruction*).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa masalah yang telah peneliti amati dalam penelitian ini. Sehubungan dengan kondisi Gunung Semeru yang belum meletus pada saat ini, dan jika sewaktu-waktu Gunung Semeru meletus sedangkan manajemen pengurangan risiko bencananya tidak berjalan dengan baik, akan menimbulkan dampak dan bencana yang tergolong besar. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang perlu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi ancaman letusan Gunung Semeru yaitu pada kegiatan pencegahan bencana atau yang dikenal dengan kegiatan pra-bencana, berupa kegiatan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan peringatan dini dengan prakarsa masyarakat lokal itu sendiri dalam pelaksanaannya.

Salah satu pertimbangan umum dalam Kerangka Aksi Hyogo (ISDR: 2005) adalah “Baik komunitas dan pihak berwenang di tingkat lokal harus di berdayakan dalam mengelola dan meredam risiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber daya, dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi peredaman risiko bencana”. Peredaman risiko bencana harus dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas lokal dan pihak berwenang dalam setiap langkah penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas menjadi metode alternative penanggulangan risiko bencana.

Sebagai desa yang masuk dalam peta rawan bencana karena dekat dengan Gunung Semeru dan daerah yang menjadi langganan banjir lahar dingin, Desa Supit Urang merupakan satu-satunya desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana Gunung Semeru, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana Gunung Semeru yang merugikan. Pada tahun 2011 atas inisiatif masyarakat sendiri serta bantuan dari Kepala di Desa Supit Urang telah terbentuk komunitas dengan sebutan Laskar Semeru guna mendukung upaya-upaya pengurangan risiko

bencana Gunung Semeru di wilayah Desa Supit Urang pada khususnya dan wilayah Kecamatan Pronijiwo pada umumnya. Dimana komunitas ini memprioritaskan pada kegiatan pengurangan risiko bencana pada tahap pra bencana. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik di kantor BPBD Kabupaten Lumajang Bapak Hendro Wahyono bahwa “komunitas ini menyediakan mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas Pengurangan Risiko Bencana melalui proses konsultatif dan partisipatif.

Dengan kenyataan dilapangan, yaitu kurangnya perhatian dan kepedulian dari masyarakat dalam memahami bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan bencana dan mengalami keterbatasan alat *early warning system* atau sering disebut dengan kamar A. Dan masyarakat juga belum banyak mengerti mengenai kegunaan alat *early warning system* tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hendro Wahyono selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik di kantor BPBD Kabupaten Lumajang dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 September 2012 bahwa:

“penyuluhan dan pelatihan praktek simulasi bencana letusan gunung semeru bagi penduduk yang tempat tinggalnya terkena dampak letusan Gunung Semeru masih terbatas. Program dari BPBD Provinsi kadang juga tidak sesuai dengan probabilitas/kemungkinan terjadinya bencana yang ada di daerah. Ancaman bencana letusan gunung berapi kan lebih besar dan sering terjadi daripada bencana tsunami di Kabupaten Lumajang, tetapi BPBD Provinsi memiliki sudut pandang lain dengan memberikan penyuluhan tentang bahaya tsunami. Padahal di Lumajang ndak pernah ada tsunami”.

Dari beberapa informasi dan fakta tersebut, menunjukkan bahwa adanya perbedaan sudut pandang pikiran tentang menaggulangi bencana. Hal ini dapat berakibat sangat fatal apabila diabaikan dan masyarakat yang nantinya akan merasakan dampaknya.

Setelah observasi awal yang dilakukan peneliti sehingga mendapatkan gambaran bagaimana permasalahan manajemen pengurangan risiko bencana Gunung Semeru, berbasis komunitas peneliti memfokuskan pada tahap pra bencana. Hal ini dikarenakan manajemen pengurangan risiko bencana Gunung

Semeru berbasis komunitas di Desa Supit Urang merupakan langkah baru yang dilakukan pada tataran pra bencana pada khususnya dan menanggulangi bencana pada umumnya serta memiliki kearifan lokal sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang dilakukan dimanapun tentunya berawal dari adanya suatu masalah. Tanpa adanya suatu masalah, maka suatu penelitian tidak akan bisa dilakukan. Lexy Moleong (2008:92) menyatakan bahwa:

”Penelitian jenis apapun titik tolaknya tidak lain bersumber pada masalah. Tanpa masalah penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Masalah itu, sewaktu akan mulai memikirkan suatu penelitian, sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut”.

Masalah penelitian adalah pertanyaan yang muncul dalam pikiran peneliti tentang sesuatu gejala atau bagian dari gejala yang belum diketahui jawabannya. Dalam penelitian, kata *“masalah”* tidak berarti sesuatu yang harus dipecahkan, tetapi adalah sesuatu pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya. Oleh karena itu, penelitian terbatas pada usaha untuk menemukan jawaban. Sedangkan usaha untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah itu, termasuk *“implikasi”* dari penelitian itu (dalam Kasiram, 2008:60). Rumusan masalah sangatlah penting keberadaannya didalam sebuah penelitian. Hal tersebut dikarenakan supaya terdapat pembatasan atas permasalahan yang akan dipecahkan didalam sebuah penelitian. Sehingga tidak terjadi perluasan dalam pokok bahasan dalam suatu penelitian dan menjadikan pembahasan lebih fokus pada suatu permasalahan utama dalam penelitian. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung**

Semeru Berbasis Komunitas di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh peneliti karena suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan, yang mana tujuan penelitian tersebut nantinya akan menjadi suatu arahan atau petunjuk di dalam pelaksanaan suatu penelitian. Kasiram (2008:30) menyebutkan “Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada”. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas di Desa Supit Urang Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan atas tujuan dari penelitian ini maka penelitian ini mempunyai beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan kedepannya mampu menambah pengetahuan dan memberikan wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya sebagai pengembangan Ilmu Administrasi Negara.

b. **Manfaat Praktis**

Memberikan masukan atau dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkaitan dan bersangkutan dalam masalah yang berhubungan dengan tema penelitian.

c. **Manfaat Pribadi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sekaligus sebagai pemenuhan tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan mengenai bencana yang disebabkan oleh faktor alam tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik berupa kerugian korban jiwa maupun kerugian kerusakan infrastruktur. Dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana tersebut memerlukan pengelolaan yang baik oleh pemerintah pada tingkat pusat maupun pemerintah pada tingkat daerah, karena permasalahan bencana merupakan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan-kepentingan publik, seperti halnya yang diungkapkan oleh Pramusinto (2009:129) sebagai berikut:

“bencana erat kaitannya dengan pembangunan, dimana persoalan mengenai bencana sendiri bukanlah semata-mata persoalan fisik yang menyangkut berapa besaran skala bencana, di mana pusat bencana, berapa kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh bencana dan lain-lain. Bencana menyangkut persoalan administrasi publik dan kebijakan publik, karena adanya bencana tersebut mengacu isu-isu sebagai berikut: siapa saja korbannya, berapa banyak anggaran yang harus dikeluarkan, siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengatasi persoalan, bagaimana mekanisme organisasi penanggulangan bencana, siapa dan bagaimana melakukan monitoring kegiatan dan lain-lain.”

Konsep dalam suatu penelitian ilmiah mempunyai maksud dan fungsi sebagai penyederhanaan sekaligus memberikan landasan kerangka berfikir untuk membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Lebih lanjut Singarimbun dan Efendi (2006:33) memberikan pengertian konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Maka sesuai dengan konsepsi teori yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Perspektif Administrasi Publik Dalam Bencana
2. Pengurangan Resiko Bencana
3. Manajemen Bencana
4. Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

2.1 Perspektif Administrasi Publik Dalam Bencana

Disadari, kegagalan pemerintah selama ini dalam membangun sebuah bangsa yang tangguh ternyata lebih disebabkan oleh perilaku dan tindakan-tindakan pemerintah sendiri yang cenderung sentralistik, top-down, *self-oriented*, monopolistik, represif, kurang peka terhadap aspirasi serta partisipasi masyarakat, tidak demokratis, serta penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibatnya, potensi biaya sosial, kerusakan lingkungan hidup harus dibayar mahal oleh masyarakat generasi kini dan mendatang, yang pada akhirnya bermuara kepada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik beberapa dekade belakangan ini telah cenderung diwarnai oleh berbagai permasalahan yang mencakup; sentralisasi kekuasaan pemerintah yang terlalu dominan, terhambatnya saluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan berbagai persoalan lainnya yang menunjukkan dominasi kekuasaan pemerintah. Semuanya itu menunjukkan adanya karakteristik *bad governance*.

Kini telah terjadi pergeseran paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sementara itu, menurut Santosa (2009:130) prinsip-prinsip atau pun karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum. Transparansi, daya tanggap, orientasi terhadap konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, visi strategis dan saling berkaitan yang memberdayakan.

Sudah bisa dipastikan, pendirian sebuah negara mempunyai tujuan. Tujuan tersebut dicantumkan dalam konstitusi negara masing-masing. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersurat cita-cita dan tujuan pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alinea keempat UUD 1945, secara tegas menyatakan bahwa tujuan-tujuan yang hendak dicapai

pemerintah adalah untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tentu tidak mudah mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur bangsa kita itu, karena kompleksnya permasalahan yang harus ditangani pemerintah dan salah satunya mengenai bencana. setiap tindakan pemerintah dipastikan akan mempunyai dampak dalam kehidupan kemasyarakatan. semakin intensif kegiatan dan tindakan pemerintah, dan semakin pentingnya peranan organisasi-organisasi besar, akan semakin besar dan dalam pula dampak tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Apa yang mereka lakukan itu bersifat publik. Akibat pentingnya arti tindakan dan kegiatan yang bersifat publik itu, maka kemudian berkembang satu kajian baru, yang dikenal dengan nama kebijakan publik.

Untuk mewujudkan misi yang termasuk di dalam aspek yang ingin dicapai oleh organisasi publik harus disertai dengan suatu kebijakan publik. Menurut Chandler dan Plano (1988:107) dalam buku Kamus Administrasi Publik dalam Donahue (2003) sebagaimana dikutip oleh Yeremias (2008:60) menjelaskan bahwa, *public policy* adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public atau pemerintah. Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa, kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan tidak hanya dilihat sebagai pemanfaatan strategis semata terhadap sumberdaya, akan tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam dan sangat menentukan. Berdasarkan penjelasan Chandler dan Plano tersebut, dapat dibenarkan bahwa masyarakat perlu atau harus turut serta dalam pemerintahan (dalam hal ini kebijakan).

Partisipasi sangat diperlukan dalam rangka demokrasi, bahkan Berelson dalam Ventris (2003) sebagaimana dikutip oleh Yeremias (2008:83) menyatakan bahwa, partisipasi adalah syarat mutlak untuk demokrasi itu bisa hidup atau terlaksana. Indonesia sebagai Negara yang sudah menerima ideology demokrasi

bahkan telah mendapatkan penghargaan demokrasi dan telah diakui oleh dunia internasional, maka partisipasi harus diterima dan dipraktekkan dalam sistem politik, administrasi pemerintahan, dan proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi tidak boleh terpisahkan dalam proses pemerintahan.

Partisipasi secara logis memberi pengaruh positif terhadap kinerja atau pencapaian hasil dan kepuasan. Menurut Wang dan Wart (2007) sebagaimana dikutip oleh Yeremias (2008:83), partisipasi juga penting dalam membangun *public trust*. Ketika masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi, maka masyarakat akan beranggapan bahwa pemerintah tidak menipu mereka (masyarakat), pemerintah dekat dengan rakyat, dan pemerintah dapat dipercaya. Partisipasi juga dapat membentuk masyarakat menjadi masyarakat yang terdidik dan terampil serta masyarakat dapat belajar (*learning process/education and gain skills*). Pemerintah juga memerlukan partisipasi, karena pemerintah dapat meyakinkan masyarakat, membangun *trust*, mengurangi kegelisahan, membangun aliansi strategis (*strategic alliances*), dan mendapatkan legitimasi (*gain legitimacy*).

Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas bahwa, sikap merupakan bentuk partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam *good governance* melalui peran sebuah komunitas yaitu membentuk masyarakat tangguh menghadapi bencana dengan berbasis komunitas, sangat penting dilakukan karena masyarakat merupakan sasaran dari kebijakan tersebut secara langsung akan menerima dampak dari adanya kebijakan atau program yang dinamakan Desa Tangguh Bencana. Di samping itu, proses keterlibatan masyarakat dalam kebijakan juga dapat membentuk masyarakat yang aktif dan cerdas serta mau belajar sehingga nantinya dapat membentuk masyarakat yang lebih dewasa dalam berpola pikir dan bertindak yaitu dengan kata lain dapat membentuk masyarakat yang mandiri, di mana masyarakat tidak harus menunggu pemerintah dalam usaha pemenuhan kebutuhan (pengurangan risiko bencana). Selain itu, adanya keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan bermanfaat bagi pemerintah, di mana masyarakat akan lebih percaya dan menilai bahwa

pemerintah bertindak jujur dan adil serta benar-benar mensejahterakan masyarakatnya.

2.2 Pengurangan Resiko Bencana

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 37 menyebutkan bahwa "Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana". Kemudian kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam ayat tersebut meliputi:

1. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
3. pengembangan budaya sadar bencana;
4. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
5. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Sedangkan pengertian risiko bencana itu sendiri adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Pengurangan risiko bencana merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi akibat buruk dari bencana yang terjadi. Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, dan terutama dilakukan dalam kondisi sedang tidak terjadi bencana. Kemudian dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010-2012, 3-1 disebutkan bahwa:

"Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di tingkat internasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk masyarakat internasional."

Pengertian tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang disebutkan dalam Perka BNPB No.4 Tahun. 2008 Bab. X bahwa:

"Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi

risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan.”

Dalam pengarustamaan pengurangan risiko bencana, ada beberapa perubahan paradigma penting yang perlu dicatat, adapun paradigma tersebut, menurut Pujiono, 2007 (dalam Pramusinto, 2009:131) adalah sebagai berikut.

1. Dari respon darurat menjadi manajemen bencana: penanggulangan bencana tidak dapat lagi memfokuskan diri hanya pada penanggulangan kedaruratan (*emergency response*) pada saat bencana sudah terjadi, melainkan lebih pada pengurangan keseluruhan risiko bencana dari pengamatan risiko, pencegahan, mitigasi, kesiapan, respon, pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi.
2. Dari bencana alam menjadi bencana umum: karakteristik suatu daerah bisa membuatnya rentan terhadap bencana alam. Tetapi juga patut dititik bahwa bahaya dan kejadian bencana yang tidak semata-mata disebabkan oleh alam juga sering terjadi dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Oleh karenanya diperlukan perluasan cakupan bahasan menjadi definisi bencana yang lebih umum ketimbang sekedar bencana alam.
3. Dari tindakan kemurahan menjadi pemenuhan hak dasar rakyat: perlindungan rakyat dari dampak bencana bukan lagi sekedar tindakan kemurahan hati pemerintah terhadap rakyatnya, melainkan sebagai tanggungjawab konstitusional negara untuk memenuhi hak dasar rakyat.
4. Dari tanggungjawab pemerintah menjadi tanggungjawab bersama: penanggulangan bencana adalah sedemikian kompleksnya sehingga tidak dapat dibebankan semata-mata kepada pemerintah melainkan menjadi urusan bersama. Bagaimanapun, pada akhirnya pemerintah memegang tanggung jawab terakhir pelaksanaannya.

Pengurangan risiko bencana merupakan hal yang penting dilakukan dalam penanganan bencana. Untuk itu diperlukan adanya strategi yang dirancang secara internasional. Adapun sasaran utama dalam strategi tersebut dalam (RAN-PRB tahun 2010-2012, 3-1) yaitu.

1. Mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi, dan lingkungan.
2. Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan memberlakukan integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Pengurangan risiko bencana dilakukan dalam rangka mengurangi atau meminimalisir dampak yang disebabkan oleh terjadinya bencana. Sehingga korban bencana atau sasaran yang akan menjadi korban dalam suatu bencana lebih mampu mengerti dan memahami hal terpenting yang harus mereka lakukan ketika sebelum atau saat bencana itu datang. Kegiatan pengurangan risiko bencana merupakan suatu landasan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Maka dari itu kegiatan pengurangan risiko bencana dianggap lebih relevan jika disosialisasikan kepada masyarakat yang rentan terhadap risiko bencana. Selain dapat mengurangi banyaknya korban bencana, kegiatan pengurangan risiko bencana juga mampu memotifasi dan memberdayakan masyarakat rentan bencana untuk bersiap siaga dalam menghadapi bencana yang kapanpun dapat terjadi.

2.3 Manajemen Bencana

2.3.1 Bencana

Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi terancam bencana. Pengertian bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007 tertulis bahwa:

“Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”

Bencana yang kerap menimpa makhluk di bumi tentunya memiliki kategori yang bermacam-macam. Adapun pengelompokan bencana yang

disebutkan dalam Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) tahun 2010–2012: 2-1 berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 yaitu:

“mengelompokkan bencana ke dalam bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang mengakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror”.

Potensi penyebab terjadinya bencana di Negara Indonesia dapat dikelompokkan dalam Ramli, (2010:8):

1. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/ benda-benda angkasa;
2. Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan lahan yang disebabkan ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan pertambangan. Beberapa contoh bencana non alam di Indonesia adalah peristiwa Lapindo Brantas, Kebakaran tangki di Cilacap, ledakan di Pabrik Kimia Petro Widada Gresik, dan tenggelamnya Kapal Tampomas;
3. Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan sosial antar anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku, atau ketimpangan sosial.

Berdasarkan definisi bencana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana merupakan salah satu kejadian yang bisa menimpa setiap makhluk di seluruh dunia. Bencana datang tanpa diduga dan seringkali menyebabkan banyak korban dan kerusakan-kerusakan yang merugikan banyak pihak. Bencana bukan hanya datang dari alam dan disebabkan karena kondisi alam, akan tetapi bencana dapat juga muncul akibat dari perbuatan makhluk di dunia itu sendiri.

Keberanekaragaman bencana yang terjadi tentunya memerlukan adanya suatu penataan. Bukan hanya sekedar penataan dalam penanggulangan bencana akan tetapi penataan pasca terjadinya bencana guna mengurangi risiko terjadinya bencana dalam kurun waktu mendatang. Seperti yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No.4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Bab I disebutkan bahwa:

“Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah- langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.”

Permasalahan mengenai bencana beserta penanggulangannya sangatlah memerlukan strategi yang tepat. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi ketidaktepatan sasaran dalam upaya penanggulangan bencana, maka dapat mengaibatkan ancaman baru entah pada sektor bencana itu sendiri atau mungkin pada sektor lain.

2.3.2 Penanggulangan Bencana

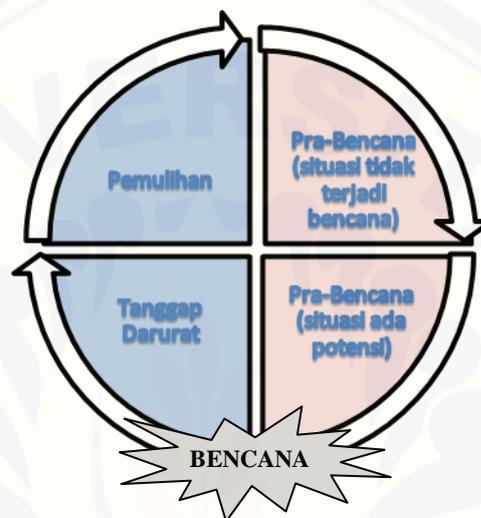
Penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi”. Selanjutnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. Lingkup luas wilayah.

Kemudian pada Pasal 33 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pascabencana.

Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Siklus Penanggulangan Bencana.

Pada dasarnya penyelenggaraan terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. pra bencana yang meliputi
 - a. Situasi tidak terjadi bencana
 - b. Situasi terdapat potensi bencana
2. saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana

Keterangan: Tahapan bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersamaan dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang.

Adapun penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Pasal 34 pada tahapan prabencana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana pada Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Hal-hal yang dilakukan dalam penanggulangan bencana pada saat tidak terjadi bencana meliputi berbagai macam kegiatan seperti yang telah tertuang diatas, salah satunya adalah kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.

2.3.3 Manajemen

Widjaja (1993:5) menjelaskan bahwa:

“Manajemen adalah *“The art of getting things done through other people”* (seni menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain). Manajemen adalah proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengendalian (controlling) kegiatan anggota organisasi dan kegiatan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.”

Kemudian Terry dan Lelie (1994:2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melihat bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola.

2.3.4 Manajemen Bencana

Ramli (2010:11) mendefinisikan manajemen bencana sebagai upaya sistematis dan komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2006 Manajemen Bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

Dari definisi-definisi di atas bisa disimpulkan manajemen bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk penanganan bencana secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan, yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, pemulihan rehabilitasi, dan rekonstruksi, baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana terjadi yang bertujuan untuk mencegah kehilangan jiwa; mengurangi penderitaan manusia; memberi informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko, serta mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis.

Menurut Ramli (2010:31) Secara umum kegiatan Manajemen Bencana dapat dibagi menjadi tiga tahapan (dimana setiap tahap terdiri dari beberapa kegiatan penanggulangan bencana). Adapun tahapan tersebut yaitu:

1. tahap Pra-Bencana. Pada tahap Pra-Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Mitigasi Bencana (*disaster mitigation*)
“Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana.”
 - b. Kesiapsiagaan (*preparedness*)
“Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.”
 - c. peringatan Dini (*early warning system*)

“Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada semua pihak tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.”

2. tahap saat bencana. Pada tahap Saat Bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

a. Tanggap Darurat (*emergency response*)

“Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.”

3. tahap Pasca-Bencana. Pada tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri dari:

a. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

“Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.”

b. Rekonstruksi (*reconstruction*)

“Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.”

2.4 Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

2.4.1 Konsep Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

Salah satu pertimbangan umum dalam Kerangka Aksi Hyogo (ISDR: 2005) adalah “baik komunitas dan pihak berwenang di tingkat lokal harus di berdayakan dalam mengelola dan meredam risiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber daya, dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi peredaman risiko bencana”.

Peredaman risiko bencana harus dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas lokal dan pihak berwenang dalam setiap langkah penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas menjadi metode alternative penanggulangan risiko bencana. Konsep istilah Manajemen Pengurangan Risiko Bencana yang berkembang di Indonesia masih belum menemukan bentuk baku yang dapat digunakan sebagai acuan yang sama. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya bermacam-macam istilah dari versi seperti “Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) atau *Community Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) sering dianggap sinonim dengan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (PBBK)/*Community Based Disaster Management* (CBDM). Tetapi konsep-konsep pengurangan risiko bencana yang berkembang di Indonesia pada intinya memiliki gagasan umum yang sama yaitu peredaman risiko bencana dengan basis komunitas atau masyarakat.

Untuk mendefinisikan konsep Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas, peneliti melakukan pendekatan dari berbagi definisi konsep di bawah ini:

- a. Lassa dan kawan-kawan (2008:8) mendefinisikan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas sebagai berikut:

“Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) atau *Community Based Disaster Risk Reduction* (CBDRR) sering dianggap sinonim dengan Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (PBBK)/*Community Based Disaster Management* (CBDM) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/pengurangan yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana”.

Definisi yang lain adalah sebuah “kerangka kerja pengelolaan bencana yang inklusif berkelanjutan dimana masyarakat terlibat atau difasilitasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan bencana (perencanaan, implementasi, pengawasan, evaluasi) dengan input sumber daya lokal maksimum dan input eksternal minimum” (Lassa, 2008:8).

b. Paripurno (2008) mendefinisikan manajemen resiko bencana sebagai berikut:

“Manajemen resiko bencana merupakan kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Manajemen resiko bencana merupakan suatu kerangka kerja konseptual berfokus pada pengurangan ancaman dan potensi kerugian dan bukan pada pengelolaan bencana dan konsekuensinya. Manajemen resiko bertujuan untuk mengembangkan suatu “budaya aman” dan menciptakan “komunitas yang tahan bencana”.

Dari definisi konsep-konsep di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas adalah suatu proses pengelolaan risiko bencana dengan kerangka kerja konseptual berfokus, yang melibatkan secara aktif masyarakat atau komunitas lokal yang berisiko mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kemampuannya. Dimana input sumber daya lokal maksimum dan input eksternal minimum dengan tujuan untuk mengembangkan suatu “budaya aman” dan menciptakan “komunitas yang tahan bencana”.

2.4.2 Tahap-Tahap Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Pelaksanaan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas didasarkan pada kearifan lokal masing-masing daerah, sehingga prioritas ataupun tahap-tahap Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yang digunakan antara daerah satu dengan daerah yang lain dapat berbeda. Peneliti menggunakan panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang diterbitkan oleh Yayasan IDEP untuk menggambarkan Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Secara garis besar

tahap-tahap dan kegiatan-kegiatan dalam manajemen bencana menurut IDEP (IDEP, 2007) sebagai berikut:

a. Sebelum bencana

1) Dibentuknya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB).

KMPB adalah organisasi yang terdiri dari anggota masyarakat manapun, baik laki-laki maupun perempuan, yang peduli pada penanggulangan bencana dalam bentuk dan nama apapun sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dibentuk atas hasil keputusan bersama. KMPB dapat juga merupakan organisasi swadaya masyarakat di luar jalur pemerintahan desa atau merupakan gabungan beberapa organisasi masyarakat yang sudah ada di desa.

2) Memperkirakan faktor risiko bencana yang dapat dibagi menjadi:

- pembuatan profil desa
- penilaian ancaman
- penilaian kerentanan dan kemampuan
- penilaian risiko
- penggambaran peta ancaman

3) Pembuatan rencana

Pembuatan rencana tersebut bias dibagi menjadi:

- a) rencana pencegahan dan mitigasi
- b) rencana kesiapsiagaan
 - Sistem peringatan dini
 - Rencana cadangan
 - Pelatihan atau simulasi

4) Pengungsian

Pengungsian adalah proses pemindahan orang ketempat yang aman dari daerah bahaya.

b. Tanggap darurat

Tanggap darurat saat bencana yang kegiatannya bias dibagi menjadi sebagai berikut:

- KMPB mempersiapkan dan menjalankan tugas seksi dan regu pada tahap saat bencana.
- Penanganan korban, untuk menentukan prioritas perawatan, perlu ditentukan bagaimana kondisi korban berdasarkan empat kelompok kondisi yaitu kritis, darurat, non kritis, dan tanpa harapan (meninggal atau tidak bisa dirawat).
- Mengamankan keadaan di lokasi bencana, dengan menempatkan beberapa orang dari regu keamanan di sepanjang jalan untuk mengatur keluar masuknya bantuan ke lokasi.
- Membuat laporan kondisi sarana, untuk digunakan oleh regu peringatan dini untuk mengetahui keadaan, untuk kemudahan akses masuk organisasi-organisasi bantuan.
- Mendirikan pos-pos bantuan kemanusiaan.

c. Sesudah bencana

1) Pemulihan jangka pendek

Hal yang diperhatikan dalam pemulihan sesudah bencana adalah:

- Kebutuhan pemulihan yang mendesak.

Adalah kebutuhan pemulihan yang perlu diutamakan walaupun hanya bersifat sementara. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan apabila masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri (pribadi/umum).

- Memperkirakan kebutuhan.

Masyarakat yang tertimpa bencana mungkin telah kehilangan banyak harta benda bahkan ada juga yang kehilangan anggota keluarga. Untuk memulai kehidupan kembali memerlukan kebutuhan materi maupun tenaga yang banyak. Masyarakat sendirilah yang paling mengetahui kebutuhan mereka, dan perlu member keterangan yang jelas tentang kebutuhan mereka kepada regu logistik untuk mengusahkannya. KMPB kemudian berusaha untuk memenuhi kebutuhan melalui

sumber daya setempat. Setelah bisa menentukan kekurangannya, kemudian bisa mengajukan permohonan bantuan dari luar .

- Mengenal sumber daya yang tersedia.

Penggunaan sumber daya yang telah tersedia atau yang bisa diperoleh di tempat sekitar. Sebagian bahan yang diperlukan oleh masyarakat mungkin sudah tersedia di masyarakat itu sendiri. Penilaian sumber daya yang ada ini sangat penting untuk segera bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Dengan dukungan dari KMPB, masyarakat bisa membuat prioritas.

2) Pemulihan jangka panjang

a) Peran KMPB dalam pemulihan jangka panjang

Proses pemulihan keadaan jangka panjang bisa menghabiskan waktu lama. KMPB dan masyarakat bisa mempercepat jalannya proses ini dengan:

- Melibatkan diri dalam proses penilaian kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.
- Melibatkan diri secara aktif dalam proses perencanaan pemulihan.
- Mengusulkan program-program yang mendukung proses pemulihan kepada sumber bantuan.
- Pengawasan proses pemulihan jangka panjang perlu dilakukan dengan cermat.
- Menjamin ketepatangunaan bahan yang digunakan.

b) Membuat peta pemulihan bencana

Peta pemulihan adalah peta yang menjelaskan keadaan setelah bencana yang bisa membantu KMPB untuk merencanakan proses pembangunan yang tepat. Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda bisa langsung menentukan tindakan pemulihan jangka panjang tanpa harus menunggu selesainya peta pemulihan bencana.

2.4.3 Pemberdayaan dan Partisipasi

A. Pemberdayaan

Masyarakat yang dahulu hanya sebagai objek dalam penanganan bencana tetapi sekarang merupakan subjek. Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan bencana harus diimbangi dengan kemampuan dan pengetahuan tentang kebencanaan sehingga pemberdayaan dalam Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas sangat diperlukan.

Ife dalam (Adi,2007:15) mengemukakan bahwa “Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan (power) pada merek yang kurang diuntungkan”. Dalam upaya pemberdayaan, maka adanya partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, karena tidak lain tujuan dari pemberdayaan adalah upaya untuk memunculkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat. Selanjutnya Craig dan Mayo dalam Huraerah (2008:82) mengatakan bahwa konsep kemandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan kerja (nertworking), dan pemerataan (equity).

Soetarso dalam Huraerah (2008:82) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu:

- a. peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial;
- b. pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi dan peranya;

Dari definisi-definisi tersebut maka pemberdayaan dalam konteks manajemen risiko bencana berbasis komunitas adalah langkah-langkah yang dilakukan Yayasan Pengembang Pedesaan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat atau komunitas Masyarakat Tanggap Bencana dalam manajemen risiko bencana sehingga muncul kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana yang terintegasi dalam kegiatan-kegiatan manajemen bencana.

B. Partisipasi

Pada Pasal 4e Undang-undang No. 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk “membangun partisipasi dan kemitraan

public serta swasta.” Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan diperlukan dalam penanggulangan bencana. Sehingga untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko bencana berbasis komunitas di desa Sitarjo, perlu disertakan gambaran bagaimana partisipasi masyarakat ataupun komunitas Masyarakat Tanggap Bencana dalam pengurangan risiko bencana.

Menurut definisi konseptual partisipasi dari Davis dalam Huraerah (2008:95) adalah “*participation is defined as mental and emotional involvement of person in group situations that encourage them to contribute to group goals and share responsibility for them*” (partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbang pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya). Dari definisi tersebut maka makna partisipasi tidak hanya sebagai pengikutsertaan saja tetapi dari definisi tersebut mengandung tiga pokok gagasan, yaitu keterlibatan emosional, dorongan untuk member sumbangan, dan penerimaan tanggung jawab).

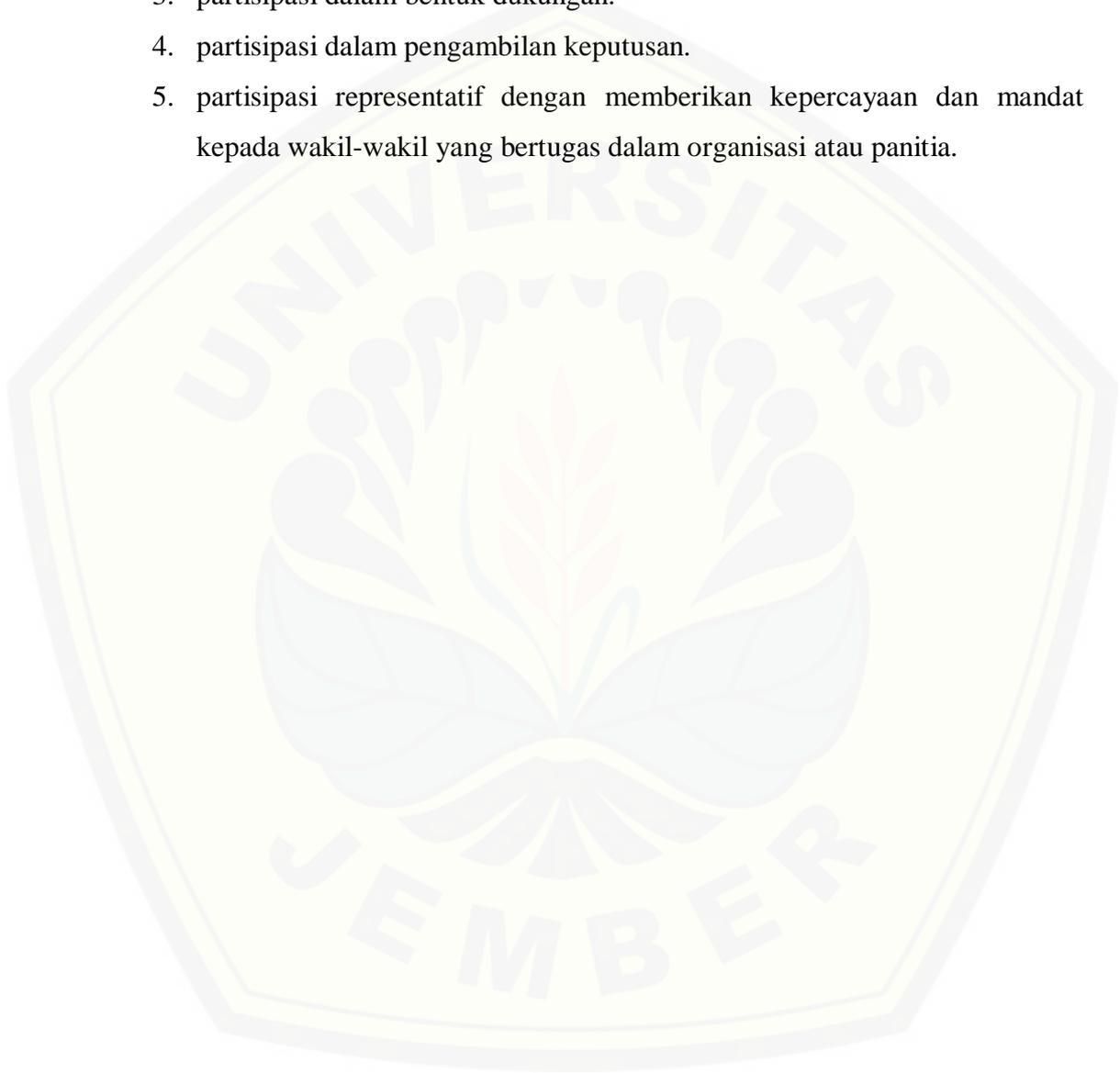
Kemudian Mubyarto dalam Huraerah (2008:96) menyatakan pengertian dasar partisipasi adalah tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan pengertian partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan.

Dari definisi-definisi diatas jika dikaitkan dalam Manajemen Risiko Bencana Berbasis Komunitas maka partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat ataupun komunitas Masyarakat Tanggap Bencana dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Di dalam keikutsertaan tersebut ada keterlibatan emosional, dorongan untuk memberikan sumbangan dan penerimaan tanggung jawab oleh masyarakat.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat menurut Sulaiman dalam Huraerah (2008:103) terdiri dari:

1. partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik atau tatap muka.

2. partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan parsipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa diperlukan dari luar, hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. partisipasi dalam pengambilan keputusan.
5. partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang bertugas dalam organisasi atau panitia.



BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Faisal dalam Kasiram (2008:47) penelitian merupakan sebuah aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandakan kebenarannya mengenai dunia alam atau dunia sosial. Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti manapun, tentunya sangat membutuhkan apa yang disebut dengan metode penelitian. Di dalam metode penelitian tersebut terdapat langkah-langkah serta prosedur yang sistematis. Metode penelitian akan menjadi dasar untuk memperoleh data dan menemukan kebenaran ilmiah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian sangat membantu dalam mengungkap kebenaran ilmiah, sehingga dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berdasarkan pengertian metode penelitian diatas maka alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian
2. Objek dan Lokasi Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Penentuan Informan
5. Metode Analisis Data
6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sugiyono (2007:380) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Sementara itu metode yang digunakan adalah metode studi kasus (*case study*) yaitu merupakan salah satu jenis penelitian

kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktifitas terhadap satu orang atau lebih.

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 1988:3) mendefinisikan metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Sedangkan Moleong (2006:6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll [*sic*], secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif, maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana peneliti akan menemukan dan mendiskripsikan pelaksanaan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Proposal penelitian yang disampaikan berbentuk deskriptif yaitu berupa data yang berbentuk kata-kata atau kalimat dan bukan berbentuk gambar maupun angka-angka. Penelitian yang peneliti lakukan benar-benar berberdasarkan fakta pengamatan yang ada di lapangan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Sebuah penelitian pasti berangkat dari suatu permasalahan. Menurut Moleong (2009:92) masalah penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Menurut Moleong (1988:237) penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan

adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria-kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan Manajemen Pengurangan Resiko Bencana Gunung Semeru Berbasis Komunitas pada tahap pra bencana di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang kemudian akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan dan akan dianalisis. Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah

1. Di Kantor Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Di Kecamatan Pronojiwo yang merupakan daerah terdekat yang terkena dampak aliran lahar letusan Gunung Semeru.
3. Di Desa Supit Urang yang merupakan desa yang memiliki komunitas dalam pengurangan risiko bencana.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh Moleong (2008:157) “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

a. Pengumpulan Data Primer

1. Interview (wawancara)

Wawancara menurut Moleong (2008:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Tanzeh (2009:63),

“ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu juga sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.”.

Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur dan tak berstruktur, karena dalam pelaksanaan wawancara peneliti akan melakukan wawancara dengan berlandaskan fokus yang dibuat secara terstruktur, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan diluar fokus yang sekiranya perlu diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan. Selain itu peneliti akan melakukan wawancara dengan informan-informan yang dianggap mampu memberikan informasi tentang pengurangan resiko bencana di Kabupaten Lumajang.

2. Obsevasi

Seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2008:174) mengatakan bahwa pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Melalui metode ini nantinya akan memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan subyek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas, melainkan hanya sebagai pengamat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha Manajemen Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas yang dilakukan di Desa Supit Urang.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan sumber-sumber lain yang mendukung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi. Menurut Guba dan Lincoln yang dikutip Moleong (2008:216) “Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, serta tentang pendataan lain yang masih berada dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat. Keseluruhannya kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya.

3.4 Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan, karena informan adalah orang yang mampu memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2008:132).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan yaitu *purposive sampling*. Menurut Idrus (2009:96) “*purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya”. Sedangkan menurut Hamidi (2010:90) “*purposive sampling* ditandai secara khas oleh penggunaan pertimbangan dan upaya yang hati-hati untuk memperoleh sampel yang representatif dengan memasukkan daerah atau kelompok yang dinilai mempunyai

kekhasan”. Jadi menurut Sutrisno Hadi, 1983 (yang dikutip oleh Hamidi, 2010:90) *purposive sampling* sampelnya dapat diperoleh setelah:

1. ada pengetahuan awal peneliti (*previous knowledge*) tentang responden, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi, mengenal benar keadaan populasinya;
2. adanya kelompok-kelompok/ wilayah dari populasi (group, area, cluster), berdasarkan pengetahuan awal peneliti;
3. adanya keputusan untuk memilih kelompok/ wilayah kunci (*key group, area, cluster*) tertentu oleh peneliti (sesuai dengan tujuan penelitian). Kelompok ini yang menjadi sampel yang disebut *the typical or best people*, atau *the presumably typical areas or group in the sample*;
4. dengan demikian ada kelompok yang tidak dipilih walaupun memenuhi kriteria responden, karena dipertimbangkan bukan merupakan yang tipikal menurut pengetahuan peneliti. Tidak semua daerah, grup atau kluster dalam populasi akan diwakili dalam sampel;

Sampai pada saat ini informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bapak Hendro Wahyono selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang.
2. Kepala Desa Supit Urang.
3. Sekretaris Desa Supit Urang
4. Sekretaris Laskar Semeru
5. Beberapa tokoh masyarakat dan warga desa di Desa Supit Urang.

Peneliti memilih informan tersebut dengan pertimbangan bahwa informan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti. Selanjutnya Menurut Bungin (2007:77), terdapat dua cara dalam memperoleh informan penelitian, yaitu:

1. *snowballing sampling*, yaitu penentuan informan yang digunakan apabila peneliti tak tahu siapa yang memahami informasi objek penelitian, karena itu ia harus melakukan langkah-langkah:

- peneliti ketika memulai melakukan penelitian dan pengumpulan informasi, ia berupaya menemukan *gatekeeper*, yaitu siapa pun orang yang pertama dapat menerimanya di lokasi objek penelitian yang dapat memberi petunjuk tentang siapa yang dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian;
 - *gatekeeper* bisa pula sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, namun kadang *gatekeeper* menunjuk orang lain yang lebih paham tentang objek penelitian;
 - setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan menunjuk orang lain berikutnya yang dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah diperolehnya;
 - terus-menerus setiap habis wawancara peneliti meminta informan menunjuk informan lain yang dapat diwawancarai pada waktu yang lain.
2. *key person*: memperoleh informan dengan cara *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga ia membutuhkan *key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi;

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *snowballing sampling*. Hal tersebut dikarenakan apabila dirasa penggunaan penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dirasa kurang memenuhi, sehingga ada kemungkinan bagi peneliti dalam penambahan informan penelitian dengan menggunakan *snowball sampling* dan berlangsung hingga peneliti menemukan informan yang dianggap mampu memberikan jawaban akhir dari penelitian ini

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (dalam Moleong, 2008:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif dengan model interaktif Milles dan Huberman (dalam Hasan dkk, 2003:171) yang dikemukakan menjadi tiga alur kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

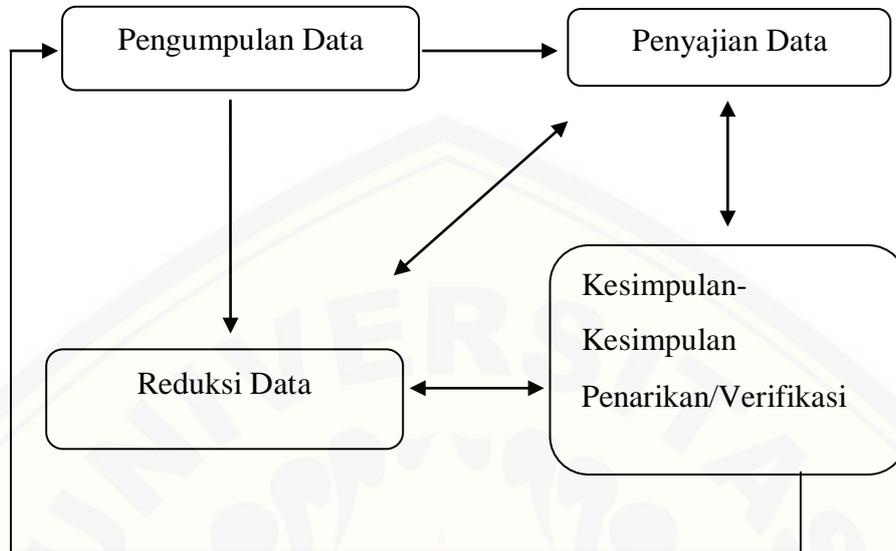
Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti perlu direduksi, dirangkum, dipilih-pilih hal pokok, difokuskan padahal-hal yang pokok, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan reduksi data selanjutnya dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menulis memo.

2. Penyajian Data

Penyajian data atau “*display data*” dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik, *network*, dan *charts*.

3. Menarik Kesimpulan

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung . sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal sering timbul, hipotesis dan sebagainya yan dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentative, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yan bersifat “*grounded*”.



Gambar 3.1 Model Intraktif Analisis Data (Miles dan Huberman)

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting. Menurut Moleong, 2008:321, Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesagihan (*validitas*) dan keandalan (*reabilitas*). Masih menurut Moleong, yang dimaksud keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Teknik keabsahan data diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2008:330) teknik triangulasi adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari yan lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin (dalam Moleong, 2008:330) membedakan teknik triangulasi menjadi empat macam, yaitu:

1. Sumber

Berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif

2. Metode

Patton membagi metode menjadi dua yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama

3. Penyidik

Yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data

4. Teori

Menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Dipihak lain, Patton berpendapat lain, bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelsan banding (*rival explanation*).

Penggunaan teknik triangulasi dengan sumber ini dimaksudkan agar peneliti melakukan teknik keabsahan data sesuai dengan informasi yang dapat diperoleh oleh peneliti. Pengecekan keabsahan data triangulasi dengan sumber tersebut berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan sebagainya.